

# PERENCANAAN

## DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER INDONESIA

### (PPRG/ *GENDER RESPONSIVE BUDGETING* [GRB])

#### Upaya PPRG diterapkan pada tingkatan-tingkatan berikut:

- ✓ Nasional
- ✓ Daerah: pemerintah kabupaten/kota dan desa

## 1. PPRG DI TINGKAT NASIONAL

### Ringkasan

Indonesia adalah salah satu negara Asia-Pasifik yang menonjol dalam hal pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG di Indonesia dimulai pada tahun 2000, dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk mengarusutamakan gender di dalam seluruh kebijakan, program dan penganggaran mereka untuk menghapuskan diskriminasi gender. Sejak saat itu, secara bertahap berbagai kemajuan telah dicapai dalam penerapan pengarusutamaan gender di pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Upaya Indonesia di bidang PPRG menonjol khususnya pada aspek-aspek sebagai berikut: 1) Penyusunan berbagai peraturan tentang PPRG; 2) Pelembagaan instrumen (*tool*) yang berfokus gender dan diterapkan di berbagai tahapan siklus anggaran; 3) *Software* penganggaran berbasis kinerja (KRISNA) yang dapat melacak belanja untuk kesetaraan gender; 4) Penyusunan berbagai manual yang menjadi panduan untuk pelaksanaan PPRG di tingkat nasional dan daerah; dan 5) Praktik PPRG partisipatif (hanya di tingkat lokal) di komunitas-komunitas di mana masyarakat sipil berpartisipasi dalam penganggaran.

Strategi PPRG pemerintah juga unik pada aspek-aspek berikut: 1) Penyusunan Strategi Nasional PPRG; 2) Dimasukkannya PPRG ke dalam Kerangka RPJMN; 3) Penggunaannya di dalam uji coba praktik PPRG baru. Sebagian instrumen (*tool*), seperti *gender budget statement* (GBS), telah diuji coba sebelum disebarluaskan; dan 4) perbaikan berbagai praktik PPRG secara progresif.

## Jangka waktu historis dan titik capaian (*milestone*)

### **2000: Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender (INPRES No.9/2000).**

Instruksi presiden ini membuka jalan pelembagaan PPRG di masa mendatang. Di dalam Inpres ini dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah "bagian tak terpisahkan dan integral dari seluruh kegiatan fungsional di seluruh lembaga dan instansi pemerintah," dan menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk mekanisme untuk mengarusutamakan gender di dalam berbagai kegiatan mereka.

**2000: Advokasi PRG.** Asia Foundation bersama dengan beberapa organisasi non-pemerintah (NGO), terlibat dalam praktik-praktik PPRG partisipatif di tingkat provinsi pada tahun 2000.

**2004: Anugerah Parahita Ekapraya Award (APE)** mengapresiasi komitmen dan peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menganugerahkan APE sejak tahun 2004.

**2007: NGO dan pelibatan parlemen.** Forum Analisis Anggaran Gender dibentuk oleh beberapa NGO dengan dukungan dari beberapa pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan DPRD untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam konteks konsultasi perencanaan *bottom-up*.

**2009: Instrumen PPRG disebutkan di dalam Keputusan No.119:** Kementerian Keuangan mengesahkan Permenkeu No.119 yang memberikan kerangka kerja untuk PPRG di tingkat pemerintah pusat. Peraturan yang selalu diperbarui secara berkala ini memandatkan kementerian dan lembaga untuk: 1) Melaksanakan analisis gender dengan menggunakan instrumen: *Gender Analyses Pathway (GAP)*. Sebagai bagian dari proses GAP, kementerian dan lembaga diharapkan untuk men-"*tagging*" (atau mengidentifikasi) alokasi dana yang dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan gender. Program ini dimasukkan ke dalam *software* penganggaran berbasis kinerja (KRISNA) yang dikembangkan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB; dan 2) Menyusun pernyataan anggaran gender dengan menggunakan format bersama, yang mencakup analisis situasi gender, tujuan, rencana aksi, kegiatan, dan alokasi anggaran terkait, keluaran (*output*), indikator kinerja, dan dampak yang diharapkan.

**2009: Peraturan PPRG.** Bappenas menerbitkan peraturan baru yang menetapkan indikator-indikator kesetaraan gender di dalam Rencana Pembangunan Nasional. Sejak saat itu, pemerintah telah mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran.

**2000-2010: Pelibatan mitra dialog:** Agensi Pembangunan Internasional Kanada (Canadian International Development Agency/CIDA) memberikan bantuan terkait PPRG kepada Bappenas, Kemenkeu, dan KPPPA. Selain itu, CIDA mendanai Asia Foundation untuk melaksanakan inisiatif PPRG pertama. UNIFEM (saat ini disebut UN Women) memberikan dukungan teknis kepada KPPPA, sementara UN Population Fund (UNFPA) mendampingi Kementerian Kesehatan dalam menyusun panduan

PPRG-nya. Ford Foundation telah memberikan pendanaan untuk PPRG, sementara Asian Development Bank mendukung inisiatif PPRG awal di Kabupaten Bandung Barat.

**2010: Pendekatan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).** Sejak tahun 2010, RPJMN telah memasukkan target-target berbasis gender dari berbagai kementerian dan lembaga. Pengarusutamaan gender adalah salah satu dari tiga prinsip lintas-sektor.

**2012: Strategi Nasional untuk Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (2012-2014).** Ini merupakan sebuah upaya bersama yang sering disebut sebagai empat "penggerak utama" pengarusutamaan gender: Bappenas, Kemenkeu, KPPPA, dan Kemendagri, yang bekerja sama dengan entitas di daerah. Terdapat sejumlah inisiatif serupa di tingkat pemerintah daerah dan desa.

**2015: Anggaran perubahan iklim yang responsif gender** telah dikembangkan di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Penganggaran perubahan iklim responsif gender menggunakan sistem KRISNA melalui *joint tagging* responsif gender untuk pos-pos anggaran yang berada di bawah *tag* responsif gender dan perubahan iklim (ada dua *tag* untuk iklim, yaitu untuk mitigasi perubahan iklim dan untuk adaptasi perubahan iklim).

**2017: Panduan PPRG:** KPPPA menerbitkan *Pedoman Monitoring PPRG Untuk Kementerian dan Lembaga*.

**2021: Panduan PPRG:** Bappenas menerbitkan *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*.

**2020-2023: Pelibatan mitra dialog:** Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa organisasi internasional telah melaksanakan pembangunan kapasitas dan diagnosis atas kondisi PPRG di Indonesia, di antaranya adalah Program Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) untuk responsivitas gender di dalam manajemen keuangan publik (2020), sebuah evaluasi yang dilaksanakan oleh US Agency for International Development (USAID) (2022); serta penilaian PPRG partisipatif di sektor perempuan, perdamaian dan keamanan yang dilakukan oleh UN Women (2023).

## Aktor kunci dan perannya

### Aktor Pemerintah

- **Kementerian Keuangan (Kemenkeu):** Fungsi-fungsinya mencakup:
  - Menyusun Kerangka Hukum untuk proses penganggaran, memastikan PPRG dimasukkan ke dalam **surat edaran terkait perumusan anggaran**;
  - Mengintegrasikan PPRG ke dalam proses perumusan anggaran dan kebijakan;
  - Bersama Bappenas, meninjau (*review*) dokumen anggaran dari kementerian/lembaga untuk memastikan kementerian/lembaga tersebut memasukkan analisis gender.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Fungsi-fungsinya mencakup:
  - Pembangunan kapasitas;
  - Mengkoordinasi *pool* bantuan teknis PPRG untuk mendukung staf perencanaan dan penganggaran di sektor/kementerian pilot;
  - Mengorganisasi presentasi tahunan Pernyataan Anggaran Gender (PAG)/*Gender Budget Statement* (GBS) kepada parlemen.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Fungsi-fungsinya mencakup:
  - Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah;
  - Pembangunan kapasitas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkenalkan PPRG ke dalam program dan kegiatan mereka;
  - Menyediakan bantuan teknis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan analisis gender dengan menggunakan model Gender Analysis Pathway (GAP) dan melaporkan PAG (GBS);
  - Mendorong kementerian dan pemerintah daerah untuk mempraktikkan PPRG;
  - Mendorong dan mendukung kementerian/lembaga melaksanakan PPRG.
- Kemendagri: Membangun kapasitas staf untuk mendukung dan mengkoordinasi kerja terkait PPRG di tingkat lokal.
- Kemenpan RB mengembangkan *software* penganggaran berbasis kinerja (KRISNA) bersama Bappenas dan Kemenkeu.
- Kementerian/lembaga dan penanggung jawab gender (*Gender Focal Point/GFP*): Kementerian/lembaga dan GFP bertanggung jawab melakukan analisis gender dan mengintegrasikan berbagai isu gender ke dalam rencana kementerian/lembaga masing-masing.
- Badan Pusat Statistik (BPS) memproduksi dan menerbitkan data terpilah jenis kelamin.

### **Aktor non-pemerintah**

- Mitra dialog dan organisasi multilateral: Asian Development Bank (ADB), UN Women (sebelumnya bernama UNIFEM), USAID, dan Bank Dunia, serta mitra pembangunan lainnya seperti Pemerintah Norwegia dan Kanada, telah memberikan dukungan untuk PPRG, khususnya di bidang manajemen pengetahuan, evaluasi, dan pembangunan kapasitas.
- Organisasi masyarakat sipil: Asia Foundation dan NGO lokal, dengan dukungan mitra dialog internasional, telah memainkan peranan penting dalam mempromosikan inisiatif PPRG di tingkat daerah.

## 2. KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER & KEBIJAKAN PPRG SPESIFIK

### Kebijakan, rencana dan strategi PPRG

- Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender ([2012–2014](#));
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

### Kebijakan pemerintah dan undang-undang yang terkait dengan kesetaraan gender

#### **Kebijakan publik:**

- Kebijakan Gender 2020 – 2023;
- Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial ([RAN P3AKS](#)), deskripsi video - teks Bahasa Inggris tidak tersedia.

#### **Undang-undang:**

- Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (2004), perlindungan korban (2006), anti-perdagangan orang (2007), dan undang-undang lain untuk menghapuskan diskriminasi gender ([tersedia secara daring](#));
- Peraturan Pemerintah No. 23/2018 tentang Skema Pajak Penghasilan Baru, di mana nilai pajak untuk UMKM dikurangi menjadi 0,5 persen, yang memberikan insentif bagi perempuan pelaku UMKM;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 22/2017 tentang Pembiayaan Ultra-Mikro. Sebagian besar peminjam adalah perempuan pemilik UMKM. Akses ke pembiayaan modal skala kecil semakin memberikan peluang kepada UMKM yang hingga saat itu kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.40/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 4 menetapkan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Peraturan ini menetapkan bahwa jaringan tempat pejalan kaki wajib dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Jaringan pejalan kaki tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia, ramah anak, dan luas trotoar harus memperhitungkan jumlah, mobilitas, dan karakteristik pengguna.
- Peraturan Menteri PUPR No.14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan ini menetapkan ketentuan-ketentuan fasilitas aksesibilitas untuk orang dari berbagai latar belakang, seperti *ramp*, *railing* (pagar pengaman), toilet, tempat parkir, ruang menyusui, tempat bermain anak, dan rambu.

### 3. PPRG DALAM PROSES PENGANGGARAN

#### Undang-undang finansial dan peraturan anggaran terkait PPRG

Peraturan-peraturan anggaran berikut tersedia di [website Kemenkeu](#):

- Instruksi Presiden 9/2000: Mempromosikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah;
- Undang-undang 17/2003: Mempromosikan penganggaran berbasis kinerja;
- Undang-undang No. 10/2008 mewajibkan minimal 30 persen perwakilan perempuan di DPR;
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara sejak tahun 2009;
- Peraturan Presiden 5/2010 tentang RPJMN dengan pengarusutamaan gender;
- Undang-undang 32/2004 tentang pemerintah daerah dan pemberdayaan perempuan sebagai fungsi wajib;
- KPPPA - Peraturan No.4/2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- Peraturan 38/2007 tentang pembagian fungsi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemberdayaan perempuan sebagai fungsi wajib;
- Kemenkeu - Peraturan No.119/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

#### Instrumen penganggaran responsif gender yang digunakan oleh Pemerintah

##### ***Instrumen PPRG Tahap Perencanaan (Ex-ante)***

- Gender Analysis Pathway (GAP);
- Gender Budget Statement.

##### **Instrumen pelacakan kesetaraan gender**

- *Software* penganggaran berbasis kinerja (KRISNA) memungkinkan dilakukannya belanja untuk melacak kesetaraan gender. Anggaran responsif gender diukur dan dikuantifikasi berdasarkan alokasi anggaran yang diverifikasi oleh Pernyataan Anggaran Gender (PAG/GBS) dan di-tag di KRISNA.

### **Instrumen PPRG Pasca Pelaksanaan (Ex-Post)**

Dua mekanisme monitoring dan evaluasi utama:

- 1) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). KPPPA mengukur kemajuan pengarusutamaan gender melalui sejumlah indikator, dan memberi penghargaan kepada kementerian dan lembaga (serta pemerintah daerah) atas kinerja mereka.
- 2) Monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan PPRG diintegrasikan dengan pendekatan yang rutin digunakan pemerintah.

#### **Manual penganggaran responsif gender yang dihubungkan dengan proses penganggaran**

- [Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di dalam Proyek Perubahan Iklim \(Kemenkeu, 2021\)](#);
- Panduan Penganggaran Responsif Gender (Bappenas, 2021);
- Panduan Monitoring PPRG untuk Kementerian dan Lembaga (KPPPA, 2017).

#### **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**

- Transparansi anggaran memadai ([OBI Score 2021](#)): 70/100 (Substansial: Memadai);
- Anggaran agregat setiap kementerian tersedia di platform publik: Ya ([Website Kemenkeu](#)).

## **4. KETERSEDIAAN DATA TERPILAH JENIS KELAMIN UNTUK PPRG**

### **Data terpilah jenis kelamin di dalam statistik nasional, data administratif, dan produsen data lainnya**

- [Badan Pusat Statistik \(BPS - Statistics Indonesia\)](#) (data terpilah jenis kelamin terbatas);
- Indikator sensitif gender yang diterbitkan oleh Bappenas di [website Bappenas](#);
- Kompilasi profil gender di 30 provinsi.

## **5. MEKANISME KELEMBAGAAN**

### **Mekanisme kelembagaan untuk mempromosikan dan mendampingi pelaksanaan anggaran yang berfokus gender (misalnya Komite PRG, GFP, dsb.)**

- **GFP (Gender Focal Point)/unit/kelompok kerja yang** dibentuk di kementerian/lembaga;
- Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- Pertemuan tahunan dilaksanakan antara GFP dengan KPPPA.

## 6. REFERENSI DAN BIBLIOGRAFI YANG DISARANKAN

Asian Development Bank (ADB), 2018, Public Financial Management Systems—Indonesia (Jakarta: ADB)

[\(2024\), Budgeting for gender equality. A practical guide to gender budgeting.](#)

[The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific \(2018\), Gender-Responsive Budgeting in Asia and the Pacific.](#)

[ASEAN Secretariat, USAID, and UN Women \(2021\), ASEAN Regional Study ON Women, Peace and Security.](#)

International Monetary Fund, (2016), [Asia: A Survey of Gender Budgeting Efforts](#). Ministry of Finance, Fiscal Policy Office, 2020, Study on Gender-Responsive Climate Change Budgeting (Jakarta: Ministry of Finance).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Kajian Identifikasi Indikasi Dampak Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender (Study to Identify Gender Mainstreaming Implementation Outcomes) (Jakarta: KPPPA).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2021, Panduan Penganggaran Responsif Gender.

[PEFA Assessment of Gender Responsive Public Financial Management, Indonesia, Jakarta, June 2020.](#)

[UN Women \(2011\), Gender profile Indonesia.](#)

(2016), [GRB in the Asia-Pacific Region: A status report.](#)

[University of South Australia \(2009\), Gender budgeting initiatives in the Republic of the Philippines.](#)

(2009), [Gender budgeting initiatives in Indonesia.](#)

[USAID \(2022\) Improving gender budgeting in Indonesia.](#)

World Bank, 2020, Indonesia Country Gender Assessment (Washington, DC: World Bank).

---

<sup>i</sup> Menurut penilaian oleh: PEFA (2020), USAID (2022), dan UN Women (2023).